

Hasil Penelitian

URGENSI PENINGKATAN AKSES LAYANAN KEUANGAN BAGI MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN MUARAGEMBONG, KABUPATEN BEKASI

(URGENCY OF INCREASING ACCESS TO FINANCIAL SERVICES FOR COASTAL COMMUNITIES IN MUARAGEMBONG SUB-DISTRICT, BEKASI REGENCY)

Gusganda Suria Manda

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361, Jawa Barat - Indonesia
email: gusganda.suriamanda@fe.unsika.ac.id

Diterima: 30 Juli 2019; Direvisi: 19 Januari 2020; Disetujui: 19 Maret 2020

ABSTRAK

Tingginya jumlah penduduk miskin di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi antara lain disebabkan oleh memburuknya kualitas lingkungan. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendekatkan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, melalui penerapan program keuangan inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan tentang layanan jasa keuangan di wilayah terpencil seperti Kecamatan Muaragembong, serta berbagai skema program layanan jasa keuangan yang memungkinkan untuk diakses masyarakat pesisir tersebut pada berbagai skala usaha. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sulitnya masyarakat Muaragembong dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan bank disebabkan usaha masyarakat masih belum bankable, mahal biaya transportasi menuju lembaga keuangan bank terdekat, dan rendahnya layanan permodalan dari lembaga keuangan bank berakibat pada maraknya praktek rentenir atau praktek bank ilegal. Terdapat berbagai alternatif layanan jasa keuangan bagi masyarakat Muaragembong, baik yang berasal dari program pemerintah pusat maupun swasta. Alternatif-alternatif layanan jasa keuangan dimaksud berupa Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, serta Pembiayaan Ultra Mikro. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus proaktif dalam mendukung program keuangan inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tersebut. Mengingat implementasi program ini sangat terkait dengan tujuan pembangunan makroekonomi Kabupaten Bekasi dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggalangan dan penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat, swasta dan pemangku kepentingan lain.

Kata kunci: inklusi keuangan, masyarakat pesisir, Kecamatan Muaragembong

ABSTRACT

The high number of poor people in Muaragembong Sub-district in Bekasi Regency is partly caused by the deteriorating environmental quality. For this reason, various efforts are needed to improve the welfare of the people in the coastal area. One of the improvement steps which can be done is to bring the community closer to financial services through the implementation of inclusive financial programs. This study aims to analyze the problems of financial services in such remote areas as Muaragembong Sub-district, as well as various financial service program schemes which allow these coastal communities to access at various business scales. The research method used qualitative analysis with a descriptive approach. Data collection obtained from observation and in-depth interviews. The results show that the difficulty faced by Muaragembong community in accessing capital from bank financial institutions is due to some reasons: community businesses that are not bankable yet, high cost of transportation to the nearest bank financial institution, and low capital services from bank financial institutions which has resulted in rampant moneylenders

or illegal bank practices. There are various alternative financial services for Muaragembong community, which may originate from either the central government or private company programs. The alternative financial services referred to in the study are those in the form of a partnership programs with State-owned Enterprises, Cooperative Revolving Fund Management Institutions, Micro, Small and Medium Enterprises, Maritime and Fisheries Business Capital Management Institutions, and Ultra Micro Finance. The Bekasi Regency Government must take proactive actions in supporting inclusive financial programs to improve the welfare of the coastal communities. This is due to the fact that the implementation of this program is strictly related to the Bekasi Regency's macroeconomic development goals as an effort to reduce poverty and income inequality. This can be implemented through raising and strengthening cooperation with the central government, private sector and other stakeholders.

Keywords: financial inclusion, coastal communities, Muaragembong Sub-district

PENDAHULUAN

Muaragembong merupakan salah satu kecamatan terpencil di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi. Menurut data Badan Pusat Statistik, wilayah kecamatan ini hanya menyumbang 0,28% terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi pada tahun 2015. Kontribusi yang kecil terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi ini memiliki korelasi dengan banyaknya jumlah kemiskinan di wilayah kecamatan ini. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Muaragembong berdasarkan penerima Kartu Jamkesmas dan Jamkesda sebanyak 13.441 orang pada tahun 2016. Sedangkan, banyaknya penduduk miskin berdasarkan jumlah pemukiman kumuh pada tahun yang sama sebanyak 1.442 keluarga, dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 1280 unit yang tersebar 11 lokasi.

Menurut Balitbangda Kabupaten Bekasi (2018), tingginya jumlah penduduk miskin antara lain disebabkan oleh adanya degradasi lingkungan, seperti pencemaran perairan, serta konversi dan degradasi ekosistem mangrove. Penurunan kualitas lingkungan dan degradasi sumberdaya pesisir di wilayah Kabupaten Bekasi telah menurunkan produktivitas masyarakat pesisir Muaragembong dalam usaha penangkapan ikan dan budidaya ikan di areal pertambakan. Pencemaran pada perairan pesisir Kabupaten Bekasi sudah berada pada taraf yang mengkhawatirkan, sebagaimana terlihat dari warna, dan bau air sungai yang selanjutnya menjadi terakumulasi di perairan pesisir (Zefri *et al.* 2009). Tekanan lingkungan lainnya terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Muaragembong adalah bencana banjir yang masih terjadi setiap tahun serta adanya erosi pantai mengikis lahan pemukiman penduduk di sekitar garis pantai (Kab. Bekasi, 2010; Muntalif *et al.*, 2013; Ekaputri *et al.* 2014).

Upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk masyarakat miskin menurut Nikijuluw (2001), dilakukan dengan mendekatkan masyarakat dengan sumber modal. Peningkatan akses keuangan bagi masyarakat secara umum sangat

terkait dengan program yang saat ini sedang digalakkan melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Program ini merupakan sebagai salah satu strategi dalam pembangunan perekonomian nasional dengan upaya penanggulangan kemiskinan, serta penurunan kesenjangan sosial dan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan kebutuhan masyarakat pesisir di Kecamatan Muaragembong yang terkait dengan peningkatan layanan jasa keuangan, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terpencil. Selain itu, dalam meningkatkan akses terhadap layanan jasa keuangan, skema program layanan keuangan apa saja yang memungkinkan untuk diakses oleh masyarakat Muaragembong. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir.

Keuangan inklusif (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun nonharga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2014; Sanjaya dan Nursechafia, 2016). Lebih lanjut menurut Bank Indonesia (2014), keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Latar belakang pentingnya penerapan program keuangan inklusif dilandasi bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan melalui terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting

keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.

Survei Bank Dunia pada tahun 2010 menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal serupa ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non-lembaga keuangan sebesar 48%. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non-bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%. Kedua survei tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan nonformal masih relatif rendah, sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan.

Menurut Rakhmindyarto dan Syaifullah (tanpa tahun), terdapat beberapa faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan, akses masyarakat menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan dan sosial inklusif. Dari sisi penawaran, beberapa faktor yang seringkali membuat masyarakat tidak dapat mengakses sektor keuangan formal diantaranya jauhnya jarak cabang bank dengan tempat tinggal, prosedur yang rumit, ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku pegawai, dan waktu operasi dari bank yang kaku.

Tabel 1. Karakteristik Kelompok Sasaran

Sasaran	Miskin berpendapatan rendah	Miskin bekerja/ Miskin Produktif	Hampir Miskin*
Kapasitas Keuangan Kemampuan menabung	Tidak memiliki kemampuan menabung sama sekali/memiliki kemampuan sangat kecil tanpa akses ke layanan tabungan	Memiliki kemampuan menabung sebagian dari pendapatan, tetapi kebanyakan menabung secara informal	Memiliki kemampuan menabung dan akses ke bank formal
Akses ke kredit	Tidak dapat melunasi	Memiliki akses ke kredit informal Mampu melunasi kredit, tetapi tidak memiliki jaminan yang dapat diterima bank	Memiliki akses ke beberapa sumber formal dan informal Mampu melunasi kredit dan memiliki barang jaminan
Kebutuhan asuransi	Sangat rentan terhadap guncangan (ekonomi) pribadi dan masyarakat	Memiliki beberapa penyangga, tetapi tetap bisa sangat berpengaruh terhadap guncangan	Memiliki beragam instrumen untuk menghadapi resiko
Kebutuhan pengiriman uang	Menerima remitansi dari anggota keluarga yang menjadi pekerja migran	Memerlukan remitansi serta kemungkinan pengiriman uang melalui ponsel	Mungkin perlu melakukan pengiriman melalui bank, membayar tagihan, dan lain-lain
Melek keuangan	Tidak ada	Sedang	Sedang
Identitas Keuangan	Tidak ada	Terbatas	Terbatas

Keterangan:

*Kategori ini, walaupun fokus pada kelompok hampir miskin (near-poor), juga mencakup mereka yang bukan miskin (termasuk kelas menengah dan masyarakat yang mampu secara ekonomi). Strategi keuangan inklusif mencakup semua orang yang berada di luar sistem keuangan, termasuk mereka yang bukan miskin (non-poor), yang meski pun memiliki peluang akses lebih besar, karena berbagai alasan belum masuk sistem keuangan.

Sumber: Bank Indonesia (2014)

Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menysasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal). Berikut ini tiga kategori penduduk sebagaimana disajikan pada tabel 1.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menjelaskan berbagai pengaruh keuangan inklusif. Sanistasya *et al.* (2019) mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan pelaku usaha kecil tidak hanya diberikan pengetahuan dan pemahaman keuangan, namun juga dilibatkan dalam keterampilan dan kompetensi keuangan yang menunjang inklusi keuangan mereka. Sedangkan hasil penelitian Adriani dan Wiksuana (2018) menunjukkan inklusi keuangan mampu memicu pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Akan tetapi dalam jangka pendek, inklusi keuangan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan. Di sisi lain, Gabriella dan Goeltom (2013) menemukan bahwa daerah dengan akses keuangan yang tinggi akan memberikan dampak pengurangan kemiskinan yang lebih besar dan peningkatan ketidakmerataan yang lebih rendah. Dengan kata lain, pembangunan keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sehingga mengurangi kemiskinan, namun dapat meningkatkan ketidakmerataan.

METODE

Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Tujuan penggunaan pendekatan tersebut adalah untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai informasi yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci (*key informant*) di lapangan. Informasi yang dihimpun meliputi kondisi dan permasalahan sosial ekonomi masyarakat pesisir, akses dan jangkauan layanan keuangan, dan sebagainya.

Metode penentuan sampel infroman menggunakan *nonprobability sampling* melalui teknik *purposive sampling*. Penentuan informan kunci secara sengaja (*purposive*) dan terseleksi dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan potensi masyarakat pesisir Kecamatan

Muaragembong. Jumlah informan kunci sebanyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari Desa Pantai Mekar (6 orang), Desa Pantai Sederhana (2 orang) dan Desa Pantai Harapanjaya (1 orang).

Selain menggunakan data primer sebagaimana terkait dalam penjelasan di atas, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa data statistik, dokumen perencanaan dan hasil penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data melalui *desk study* ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kecamatan Muaragembong merupakan wilayah kecamatan yang terluas di antara wilayah kecamatan lain di Kabupaten Bekasi. Kecamatan ini meliputi wilayah seluas 14.009 ha, atau 11% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Bekasi. Di antara kecamatan di wilayah pesisir, Kecamatan Muaragembong memiliki wilayah yang terluas, yakni 54,23% dari luas keseluruhan wilayah pesisir seluas 25.832 ha. Wilayah Kecamatan Muaragembong yang luas, tetapi dihuni oleh penduduk yang dalam jumlah dan kepadatan yang rendah. Jumlah penduduk kecamatan ini pada tahun 2017 sebanyak 33.634 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 240 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik, 2018).

Sementara itu pada tahun 2015, penduduk Kecamatan Muaragembong mayoritas bekerja di sektor pertanian, yakni sebanyak 6.234 rumah tangga atau 60,11% dari keseluruhan rumah tangga di kecamatan tersebut sebanyak 10.371 rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2017). Menurut kategori kesejahteraan, keluarga di kecamatan ini terbagi menjadi 5.512 keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), 3.888 Keluarga Sejahtera-1 (KS-1), 2.324 Keluarga Sejahtera-II (KS-II), 421 Keluarga Sejahtera-III (KS-III) dan 90 keluarga Sejahtera-III plus (KS-III+) (Badan Pusat Statistik, 2016).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan para informan kunci, diperoleh hasil bahwa pentingnya upaya peningkatan akses layanan jasa keuangan bagi masyarakat Muaragembong dilandasi akan sulitnya masyarakat mengakses permodalan dari lembaga keuangan bank. Kesulitan tersebut didasarkan dengan berbagai alasan:

Pertama, usaha yang dilakukan masyarakat sudah pasti tidak *bankable*, terutama dikarenakan oleh masalah rendahnya skala

usaha, tidak memiliki agunan yang memadai, legalitas usaha serta lemahnya penyusunan administrasi dan laporan keuangan. Suatu usaha dikategorikan bankable, jika usaha tersebut memenuhi syarat kelayakan untuk diberikan kredit oleh lembaga keuangan bank (Simorangkir, 2004). Rendahnya efisiensi dan produktivitas usaha sebagai imbas dari terbatasnya kapasitas produksi, menunjukkan usaha yang dilakukan masyarakat masih berskala kecil, sehingga akan mendatangkan biaya transaksi yang tinggi dan penuh dengan risiko. Tingginya biaya transaksi dikarenakan kredit yang disalurkan lembaga keuangan bank terlalu kecil. Risiko yang tinggi dalam penyaluran kredit disebabkan masyarakat tidak memiliki jaminan yang memadai dan legalitas usaha. (Arisani, 2005) Rendahnya mayoritas kualitas sumber daya manusia masyarakat Muaragembong dan kurangnya pelatihan usaha, antara lain menjadi penyebab lemahnya penyusunan administrasi dan laporan keuangan usaha masyarakat.

Kedua, mahalnya biaya transportasi menuju lembaga keuangan bank terdekat, mengingat letaknya yang jauh dari lembaga keuangan bank terdekat yang berada di wilayah kecamatan tetangga. Jarak dari ibukota Kecamatan Muaragembong ke ibukota kecamatan terdekat (yakni Kecamatan Cabang Bungin) kurang lebih 24 km, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Berdasarkan informasi dari informan kunci, biaya yang diberikan kurir untuk jasa transfer antarbank cukup mahal, yakni Rp 25.000,00 per transaksi. Dari sisi lembaga keuangan bank, jauhnya akses menuju wilayah Kecamatan Muaragembong mengurangi minat mereka untuk menjangkau layanan perbankan (termasuk penyaluran kredit) ke wilayah tersebut. Walaupun telah terdapat lembaga keuangan mikro berupa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di wilayah kecamatan tersebut, namun kiprahnya belum banyak dirasakan oleh masyarakat secara luas. Demikian pula peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masih belum dapat membangun akses permodalan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan BMT dan BUMDes belum dapat melayani kegiatan transaksi perbankan yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti transfer dana antarbank dan penarikan dana dari ATM. Selain itu, cakupan penyaluran kredit yang dilakukan BMT dan BUMDes masih sangat terbatas, mengingat permodalan yang masih kecil. Sepanjang penelusuran di lapangan, belum ditemukan gerai Laku Pandai, seperti BRI link, dan sebagainya.

Ketiga, rendahnya layanan permodalan dari lembaga keuangan bank untuk masyarakat pesisir kecamatan tersebut disebabkan

mudahnya masyarakat mengakses pinjaman melalui lembaga keuangan informal seperti rentenir dan praktek bank ilegal lainnya. Maraknya praktek rentenir dan ijon banyak menjerat masyarakat pesisir (khususnya masyarakat miskin). Keberadaannya sulit dilepaskan, karena di satu sisi kebutuhan masyarakat pesisir yang sangat mendesak. Kebutuhan masyarakat yang mendesak terutama terkait dengan kehilangan atau rusaknya alat tangkap mereka, seperti jaring dan bubu, sehingga jika alat tersebut tidak tersedia, maka mereka dipastikan tidak dapat melaut untuk menopang kehidupan mereka.

Memperhatikan kondisi tersebut, pemberdayaan masyarakat pesisir Muaragembong dalam rangka melakukan penguatan akses permodalan, perlu distratifikasi dan dikelompokkan menurut kemampuan usaha, sebagai berikut:

Pertama, usaha dengan kemampuan modal yang benar-benar terbatas dan kapasitas produksi yang sangat kecil. Usaha tersebut perlu didorong dengan bantuan hibah, baik untuk investasi maupun operasional, agar dapat berkembang menjadi usaha yang mampu mengakses pembiayaan atau kredit dengan bunga yang rendah.

Kedua, usaha yang belum mampu mengakses bank akan tetapi sudah lebih baik dari kelompok usaha di atas. Usaha tersebut perlu difasilitasi pembiayaan usaha dengan bunga rendah, yang bersumber dari program pemerintah seperti:

- a. Program kemitraan BUMN. Program ini merupakan bagian dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), yang dilakukan oleh BUMN sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan amanat Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Program Kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, dengan jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program ini maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih. BUMN pelaksana Program PKBL yang dapat dijadikan mitra adalah BUMN yang wilayah operasionalnya berada di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi seperti PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perhutani.
- b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Lembaga ini dibentuk oleh

Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan lembaga ini dalam rangka memperluas kesempatan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh perkuatan permodalan melalui pemberian pinjaman/pembiayaan dengan penyaluran dana bergulir. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi dapat memfasilitasi dan melakukan pendampingan pengajuan dana bergulir tersebut.

- c. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Lembaga ini didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan. LPMUKP dibentuk pada tanggal 20 September 2009 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2009, dengan tugas utama melakukan pengelolaan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi dapat memfasilitasi masyarakat Muaragembong untuk pengajuan dana tersebut.
- d. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program pembiayaan ini merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi lembaga keuangan bank melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai *coordinated fund* pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT. Pegadaian (Persero), PT. Bahana Artha Ventura, serta PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-

lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Ketiga, usaha yang sudah bankable. Usaha yang telah berada pada tahap ini paling tidak sudah memenuhi aspek entrepreneurship, kualitas produk, produksi/operasi, pemasaran, keuangan/permodalan dan legal. Aspek entrepreneurship merupakan tingkatan dini dari suatu usaha yang termasuk kategori potensial. Sedangkan hal-hal yang terkait aspek kualitas produk, operasi dan pemasaran, suatu usaha telah mulai meningkatkan kualitas produksinya, antara lain terdapat kontrol kualitas dan menggunakan teknologi sistem pemasaran. Adapun hal-hal yang terkait dengan keuangan/permodalan dan legal, antara lain meliputi memiliki ijin usaha dan laporan keuangan yang mencerminkan prospek perusahaan. Untuk meningkatkan usaha yang sudah bankable, dapat diberikan suntikan modal dari lembaga keuangan bank, baik melalui KUR atau kredit komersial. Bagi pelaku usaha ini, perlu difasilitasi sertifikasi dan pelayanan usaha yang mendorong daya saingnya.

Guna meningkatkan layanan lembaga keuangan bank bagi masyarakat Muaragembong untuk bertransaksi, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pendirian kantor cabang pembantu atau kantor kas perbankan, khususnya bank-bank BUMN atau Bank Pembangunan Daerah. Namun demikian, kemungkinan untuk merealisasikan hal tersebut dirasa cukup berat, mengingat kebijakan sektor keuangan saat ini tengah menerapkan *branchless banking*. Sebagai alternatif lain untuk pelayanan transaksi perbankan bagi masyarakat Muaragembong, Program Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif dapat diterapkan. Program ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya, melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Hal ini dirasa cocok untuk masyarakat Muaragembong yang bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.

BMT dan BUMDes dapat mengambil peran dalam pelaksanaan Program Laku Pandai ini, agar masyarakat Kecamatan Muaragembong dapat memperoleh peningkatan akses layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya. Selain melakukan penguatan modal dan kelembagaan, BMT dan BUMDes juga dapat memberikan sistem jaminan alternatif yang lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait, penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, dan melakukan identifikasi nasabah potensial.

Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat melakukan fasilitasi melalui forum intermediasi, dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*) dan mendorong peningkatan kerja sama antarlembaga keuangan. Dari sisi masyarakat, diperlukan edukasi keuangan yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, perlindungan nasabah, dan keterampilan mengelola keuangan.

Penerapan program keuangan inklusif memiliki relevansi dengan berbagai ketentuan lain dalam rangka pengembangan ekonomi sektoral. Hal tersebut antara lain sangat relevan dalam kaitannya dengan masyarakat pesisir berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Berdasarkan amanat aturan perundangan tersebut, masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang pada umumnya berada di wilayah pesisir untuk diberikan akses modal dan jaminan usaha.

KESIMPULAN

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Muaragembong dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan bank adalah: usaha masyarakat masih belum *bankable*; mahal biaya transportasi menuju lembaga keuangan bank terdekat; dan, rendahnya layanan permodalan dari lembaga keuangan bank yang berakibat pada maraknya praktek rentenir atau praktek bank ilegal. Alternatif layanan jasa keuangan yang memungkinkan untuk diakses oleh masyarakat Muaragembong, berupa skema layanan jasa keuangan melalui program pemerintah pusat maupun swasta. Penerapan program keuangan inklusi diharapkan dapat mendukung pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial maupun wilayah di Kabupaten Bekasi.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus lebih proaktif dalam implementasi program keuangan inklusif bagi masyarakat Kecamatan Muaragembong khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya. Hal tersebut mengingat, implementasi program ini sangat terkait dengan tujuan pembangunan makroekonomi Kabupaten Bekasi dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalang

dan memperkuat kerja sama, baik dengan pemerintah pusat, swasta maupun pemangku kepentingan lain.

2. Perlu penelitian lanjutan, yaitu kajian tentang persepsi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi serta masyarakat (khususnya masyarakat pesisir) dalam penerapan program keuangan inklusif, yang dilakukan dengan metode survei dan pendekatan kuantitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi beserta jajarannya yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya pula disampaikan untuk Pemerintah Desa Pantaimekar dan Pantaibahagia, atas fasilitasi yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyusun dan merumuskan rencana pembangunan di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, D. dan Wiksuana, I.G.B. 2018. Inklusi Keuangan dalam Hubungannya dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7 (12), hal 6420-6444.
- Arisani, N.W.I. 2005. Kajian Karakteristik Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM) untuk Pengembangan Kredit Usaha Kecil: Studi Kasus di Kab. Bogor. Tesis. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Kecamatan Muaragembong.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kecamatan Muaragembong Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Bekasi Dalam Angka.
- Balitbangda Kab. Bekasi. 2018. *Kajian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pesisir Pantai Kabupaten Bekasi*. Bekasi: Balitbangda Kab. Bekasi.
- Bank Indonesia. 2014. Booklet Keuangan Inklusif. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ekaputri, D. Windupranata, W. dan Harto, A.B. 2014. The Calculation of Erosion and Sedimentation Rate in Coastal Zone Using Satellite Imagery (Case Study: Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, West Java). *Indonesian Journal of Geospatial* 2 (3), hal 17-33.
- Gabriella, L.G. dan Goeltom M.S. 2013. Pengaruh Pembangunan Keuangan Perbankan dan Akses Keuangan Perbankan terhadap Kemiskinan di

Indonesia [Online]. Dari: <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S44038-Laura%20Grace%20Gabriella> [Diakses: 28 Juli 2019].

Muntalif, B.S., Hasian, O. dan Sembiring, E. 2013. Valuasi Ekonomi dan Upaya Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi. *Jurnal Teknik Lingkungan* 19 (1), hal 82-90.

Nikijuluw, V.P.H. 2001. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara Terpadu. Dalam: Bengen, D.G., editor. *Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Bogor, 29 Oktober-3 November 2001. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, hal 14-27.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025

Rakhmindyarto. dan Syaifullah. tanpa tahun. Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan [Online]. Dari: <https://www.kemenkeu.go.id/media/4459/keuangan-inklusif-dan-pengentasan-kemiskinan.pdf> [Diakses: 28 Juli 2019].

Sanistasya, P.A. Rahardjo, K. dan Iqbal, M. 2019. Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. *Jurnal Economia* 14 (1), hal 48-59.

Sanjaya, I.M. dan Nursechafia. 2016. Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 18 (3), hal 281-306.

Simorangkir, O.P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Zefri. 2009. Model Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir: Kasus Pantai Utara Kabupaten Bekasi. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.